

Merajut Kembali Relasionallitas Masyarakat dan Pemerintah

Relevansi Politik Berasaskan Rekonsiliasi dan Kebenaran

Martin C. Barut^{1*}, Pius Kanelmut², Krispianus W. Sarhe³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang, Indonesia

*Correspondence Author, E-mail: martinc.barut@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

rekonsiliasi,
kebenaran,
perdamaian,
rasionalitas komunikatif

Article history:

Received 2021-03-19

Revised 2021-04-30

Accepted 2021-6-27

ABSTRACT

The center of the study of this paper is to explore and understand Armada Riyanto's ideas about reconciliation and truth. The ongoing political and security dynamics generate new and rich awareness and meaning in the pursuit of peace. The methodology used in this paper is 'phenomenology', that is, everyday phenomena become the main source of philosophy. By looking at the political reality from marginal notes, from phenomenological experience, this research comes to the finding that the political concept based on reconciliation and truth is a relevant political program to seek peace. Reconciliation cannot be carried out without revealing the truth and a truth will have a deep meaning in the act of reconciliation. The government and society have a responsibility to cultivate the virtue of peace. The synergy between the government and the community determines the progress of the life of the nation and state.

ABSTRAK

Pusat kajian makalah ini adalah untuk menggali dan memahami pemikiran Armada Riyanto tentang rekonsiliasi dan kebenaran. Dinamika politik dan keamanan yang sedang berlangsung menghasilkan kesadaran dan makna baru dan kaya dalam mengejar perdamaian. Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah 'fenomenologi', yaitu fenomena sehari-hari yang menjadi sumber utama filsafat. Dengan melihat realitas politik dari catatan marginal, dari pengalaman fenomenologis, penelitian ini sampai pada temuan bahwa konsep politik berdasarkan rekonsiliasi dan kebenaran merupakan program politik yang relevan untuk mencari perdamaian. Rekonsiliasi tidak dapat dilakukan tanpa mengungkapkan kebenaran dan suatu kebenaran akan memiliki makna yang mendalam dalam tindakan rekonsiliasi. Pemerintah dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan nilai perdamaian. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat menentukan kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk peziarah atau *homo viator*. Dalam peziarahannya itu, manusia mengalami pasang surut dan susah senang kehidupan. Itulah keseharina hidup manusia. Berfilsafat politik yang digagas Armada merujuk pada keseharian hidup manusia. Baginya, berfilsafat sehari-hari merupakan kata lain dari berfilsafat fenomenologis. Hidup sehari-hari menjadi sumber pengetahuan, sekaligus khazanah kebajikan dan kebenaran. Oleh karena itu, berfilsafat dalam konteks politik perlu dijalankan dalam metodologi baruⁱ.

“From the margins, from below, from earth, from rough ground, from market place, from lifeworld, from everyday life, from human vignette of society, from catatan pinggir, from phenomenological experience.”

Politik di Indonesia selalu mengedepankan aspek rukun rukun. Politik di Indonesia berbasis perdamaian. Armada melihat bahwa perdamaian bukan sekadar merujuk rukun. Lebih dari itu, perdamaian adalah keberanian mengungkapkan rasa bersalah dan mau mengubah diri. Pada periode yang belum terlalu lama, publik Indonesia dihebohkan konflik yang terjadi antara pihak kepolisian dengan salah satu ormas. Salah satu media *online* mengabarkan bahwa para perangkat keamanan pada periode itu, Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol.) Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Mayjen (TNI) Dudung Abdurachman, Karopaminan Divpropam Polri Brigjen (Pol.) Hendra Kurniawan dan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes (Pol.) Yusri Yunus menyampaikan keterangan pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (7/12/2020). Kapolda mengungkapkan telah terjadi penyerangan pada Senin (7/12/2020) pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta-Cikampek kilometer 50 terhadap anggota Polri yang bertugas menyelidiki informasi rencana pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan Rizieq Shihab. Enam dari sepuluh orang yang diduga pengikut Rizieq Shihab tewas diduga ditembak polisi karena melakukan perlawanan dengan senjata apiⁱⁱ. Konflik lain yang tidak kalah menghebohkan terjadi pada bulan Oktober yang lalu pasca dikeluarkannya *Omnibus Law* UU Cipta Kerja. Demonstrasi merebak di mana-mana, lantaran tidak menyetujui UU tersebut. Berbagai forum dari kalangan masyarakat dan mahasiswa beramai-ramai turun ke jalan untuk mengupayakan penolakan dan tidak jarang dibarengi aksi tidak terpuji.

Kenyataan tersebut sejajar dengan gagasan Thomas Hobbes yang melihat kodrat manusia adalah ‘perang.’” Dalam terminologi tentang ‘*The State of Nature*’, Hobbes melihat hidup manusia tidak dalam keteraturan hukum. Sebaliknya, hidup manusia ada dalam disposisi yang mengengaskanⁱⁱⁱ. Akibatnya, keberadaan manusia menjadi terancam. Kondisi dan kenyataan itu berlawanan dengan gagasan Armada yang melihat kodrat manusia adalah kebenaran dan perdamaian. Menurutnya, tema perdamaian pada gilirannya menjadi sangat relevan. Alasannya, perdamaian merupakan kesempurnaan eksistensi manusia^{iv}. Secara natura, manusia terdorong untuk merealisasikan dirinya. Manusia ingin bebas dari belenggu dan ingin mengusahakan hidup yang utuh, kreatif, dan mandiri. Politik tidak terlepas dari kehidupan manusia. Dalam pergumulan politik, konflik dan pertentangan sangat rentan terjadi dalam satu negara. Dua

kasus atau konflik yang sudah disebutkan dari sendirinya menimbulkan situasi ketidaknyamanan dan nirkedamaian. Selain itu, pemerintah yang seharusnya menjadi pengayom kepentingan rakyat mendapat citra buruk yang berujung pada mosi tidak percaya. Sinergitas antara masyarakat dan pemerintah menjadi dipertanyakan.

Politik berasaskan rekonsiliasi dan kebenaran merupakan suatu program politik yang pada dasarnya sebuah ikhtiar untuk merajut perdamaian. Kenyataan pertentangan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah, pada gilirannya membutuhkan upaya rekonsiliasi, ketulusan menatap kebenaran yang sempat terlindas salah paham, dan kerendahan hati mendeklarasikan *mea culpa*. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menyampaikan dua permasalahan. *Pertama*, bagaimana politik berasaskan kebenaran dan rekonsiliasi menurut Armada Riyanto. *Kedua*, bagaimana merajut kembali relasionalitas masyarakat dan pemerintah.

2. Hasil dan Pembahasan

a. Politik berasaskan kebenaran dan rekonsiliasi menurut Armada Riyanto

1) Riwayat Hidup Singkat dan Karya Armada Riyanto

Armada Riyanto dilahirkan di Nganjuk 6 Juni 1965. Ia adalah seorang seorang Profesor filsafat dari STFT Widya Sasana Malang. Sebagai filsuf dan teolog saat ini ia juga menjadi dosen tamu di pelbagai kampus di Indonesia. Minat dan kontribusinya dalam filsafat-teologi biasanya terkait dengan studi-studi dialog interreligius, filsafat politik, dan bidang ajaran sosial Gereja. Armada Riyanto juga menulis banyak buku dan artikel ilmiah di berbagai jurnal penelitian filosofis dan teologis. Beberapa karyanya adalah *Right and Obligation in Thomas Hobbes* (1996), *Dialog Agama* (1996), *Agama dan Kekerasan* (2001), *Agama Anti-Kekerasan* (2002), *HAM* (2003), *Membangun Gereja dari Konteks* (2005), *Formation and Mission* (2006), *Political Charity and Formation* (2007), *Interreligious Dialogue and Formation* (2009), *Dialog Interreligious: Historisitas, Tesis, Pergumulan, Wajah* (2010), dan *Politik, Sejarah, Identitas dan Postmodernitas* (pidato profesorat, 2009).

Kunci utama memahami pemikiran Armada berkenaan dengan politik yang rekonsiliatif dan kebenaran adalah politik tidak dapat dicabut dari keseharian. Ia mengelaborasi pemikiran filsafat dengan hidup harian. Manusia selalu hidup dalam relasionalitas. Relasionalitas 'aku masa lampau' dan 'aku masa depan' merupakan suatu elaborasi harmonis untuk memahami kehidupan.

2) Rekonsiliasi dan Kebenaran

Tema tentang rekonsiliasi dan kebenaran dalam buku 'Berfilsafat Politik' berada dalam bingkai historis politik. Dalam berpolitik jangan melupakan sejarah. Sejarah merupakan khazanah nilai-nilai kehidupan bangsa, aktivitas berpolitik tidak bisa dicabut dari warisan luhur sejarah^v. Sejarah dalam konteks politik menjadi semacam rujukan yang pada saat yang sama memberikan visi dan misi dalam perjuangan mengelola kehidupan bangsa. Setiap momen sejarah memiliki khazanah makna yang otentik dan aktual. Sejarah selalu relevan dengan masa sekarang dan masa depan terutama menyangkut aktualitas nilai yang formatif dan konstruktif bagi peradaban yang mengedepankan kemanusiaan.

Berhadapan dengan kenyataan kekerasan yang bergelimangan, Armada mengajukan pertanyaan terkait apa yang perlu diwartakan? Saat berpolitik dengan 'tidak melupakan sejarah', Armada mengajukan pertanyaan, apa selanjutnya^{vi}? Menurutnyaa, kelanjutannya adalah keberanian mengupayakan rekonsiliasi, ketulusan menatap kebenaran yang sempat terlindas

salah paham di masa lampau, dan kerendahan hati mendeklarasikan *mea culpa* (permohonan maaf) atas kekerasan di masa lampau untuk tetap tegar ke masa depan. Pelajaran paling berharga ditampilkan seorang Walter Mandela, yang setelah dipenjara tiga puluh tahun lebih, tidak menaruh dendam kepada rezim apartheid yang memenjarakannya. Ia justru merangkulnya untuk membangun rekonsiliasi di tanah airnya, Afrika Selatan. Armada menegaskan^{vii} bahwa rekonsiliasi bukan berarti mendukung para penjahat atau teroris, melainkan mencoba menawarkan nilai kebenaran dalam realitas yang tidak mencintai perdamaian.

Menurut Alex Honneth, rekonsiliasi dipondasikan dalam gagasan tentang '*recognition* (pengakuan)^{viii}. Secara etimologis pengakuan berarti 'menemukan' atau 'mengetahui sekali lagi tentang sesuatu atau seseorang'. Ungkapan ini juga datang dari kata kerja bahasa Latin '*cognoscere*'. Artinya, mengetahui. Dengan demikian, pengakuan menjadi tindakan untuk memperoleh pengetahuan sekali lagi, yang membuka kemungkinan untuk melihat sesuatu berdasar cara pandang yang baru. Dengan kata lain, ada perhatian yang benar pada ciri, sifat, atau aspek yang barangkali tidak disadari sebelumnya. Pengakuan menjadi seperti '*detour*' dalam perputaran sosialitas masyarakat.^{ix}

Rekonsiliasi dan kebenaran memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Armada rekonsiliasi tidak dapat dijalankan tanpa pengungkapan kebenaran. Sebaliknya, suatu kebenaran akan memiliki makna yang mendalam saat dilanjutkan pada tindakan rekonsiliatif. Pengungkapan kebenaran bukanlah kesempatan untuk menaruh dendam, melainkan untuk menampilkan keluhuran martabat dan harkat manusia sebagaimana mestinya. Rekonsiliasi bukanlah sekadar aktivitas rujuk atau rukun. Rekonsiliasi meminta dasar dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dasar dan bukti itu bukan hanya untuk membenarkan diri atau rehabilitasi, melainkan untuk mengangkat harkat dan martabat manusiawi. Rekonsiliasi juga bukan pengampunan psikologis pada tataran sosial, melainkan perwujudan eksistensi yang mengandaikan pengakuan yuridis^x.

Rekonsiliasi pada konteks ini memiliki makna yang mendalam dan luas. Dalam konteks ini rekonsiliasi bukan sekadar aktus dadakan yang terjadi sepintas lalu. Rekonsiliasi juga bukan sebagai jalan menutup konflik dan memutihkannya noda masa silam. Rekonsiliasi mengandaikan pengungkapan kebenaran yang memberikan rasa keadilan dan mengedepankan penghargaan terhadap keluhuran martabat manusia. Dengan demikian, kebenaran menjadi faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap rekonsiliasi.

b. Realitas kehidupan

Sejak awal, gagasan *Omnibus Law* memang datang dari Presiden Jokowi sendiri. Motifnya untuk mempermudah investasi lewat pemotongan perizinan yang panjang dan berbelit. Akan tetapi, perjalanan Undang-undang Cipta Kerja memang dipenuhi kontroversi. Puncaknya terjadi saat Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan *omnibus law* RUU Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020. Pengesahan ini disambut aksi demonstrasi besar-besaran dari mahasiswa serta aliansi masyarakat sipil dan buruh di berbagai daerah di Indonesia. Mereka menuntut Presiden Jokowi menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan aturan sapu jagat ini. Unjuk rasa dilakukan karena UU Cipta Kerja dinilai memangkas hak-hak buruh. Fasilitas umum menjadi sasaran amukan massa. Pembatas jalan dibuat rusak, pagar gedung DPR dibuat hancur, satu mobil milik Kapolres Bandung dirusak, dan berbagai fasilitas umum lainnya (*Kompas*, 7 Oktober 2020). Terhadap aksi anarkis para pengunjung rasa, polisi terpaksa menembak gas air mata ke arah

kerumunan massa. Peristiwa ini mengakibatkan banyak orang yang mengalami cedera fisik. Beberapa para pengunjung rasa pun ditangkap pihak terkait.

Terkait unjuk rasa RUU Cipta Kerja, Polisi menangkap delapan orang di Sumatera Utara dan DKI Jakarta yang diduga menyebarkan informasi bermuatan kebencian dan permusuhan terkait unjuk rasa RUU Cipta Kerja. Selain itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi belum menemukan keberadaan 208 orang yang dilaporkan hilang.

“Total 524 orang yang mengadu. Sebanyak 208 orang masih ditahan dan beberapa diantaranya tidak diketahui keberadaannya. Sebanyak 316 orang dilepas,” kata anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi, Afif Abdul Qoyim^{vi}.

Terhadap aksi demonstrasi anarkis di beberapa daerah itu, Jusuf Kalla memberi tanggapan.

“Apapun posisi kita dalam menyikapi RUU Cipta Kerja, yang pasti, reaksi yang diekspresikan dengan cara kekerasan justru kian memarginalkan posisi pekerja, anak-anak kita, para mahasiswa, dan rakyat secara umum karena pasti akan berpengaruh pada investasi akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Demonstrasi yang anarkis, yang merusak infrastruktur untuk kepentingan rakyat, yang berdampak langsung ke investasi lalu pertumbuhan ekonomi, adalah ikhtiar merusak masa depan sendiri. Kita semua berniat memajukan kesejahteraan rakyat. Kekerasan dan perusakan justru bisa menjauhkan niat kita itu dengan kenyataan” (Kompas, 14 Oktober 2020).

Dinamika politik dan keamanan tidak hanya terbatas pada konflik-konflik yang telah diuraikan pada bagian terdahulu. Beberapa konflik lain yang terjadi. Sebut saja, pembunuhan di Sigi dan situasi politik di Papua. Singkat kata, bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami ketegangan yang luar biasa terutama antara pihak pemerintah dan masyarakat. Di tengah situasi konflik yang demikian, keamanan dan perdamaian menjadi cukup sulit ditemukan.

c. Merajut kembali relasionalitas masyarakat dan pemerintah

Dalam situasi yang diwarnai konflik ini, tuntutan rekonsiliasi yang terdengar sebagai sebuah ajakan saleh, akan terasa mendesak serentak sulit. Armada yang seorang filsuf hanya dapat menyampaikan suatu ideal yang memerlukan realisasi ke dalam politik. Sebagai suatu idealitas, gagasan ini perlu diaplikasikan dalam konteks berpolitik di Indonesia. Konsep rekonsiliasi dan kebenaran merupakan suatu paradigma dan program politik, sekaligus suatu pemaknaan pengalaman secara kaya, mengeritik kenaiifan, dan membela otentisitas kebenaran. Rekonsiliasi yang dipromosikan Armada dilihat sebagai suatu cetusan baru dalam berpolitik. Rekonsiliasi merupakan panggilan kemanusiaan. Rekonsiliasi menjadi basis yang harus dilengkapi dengan konsep filsafat lain, supaya dapat menjadi suatu alternatif yang lebih bermanfaat bagi politik perdamaian di era saat ini. pertanyaannya, bagaimana atau usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk menegakkan perdamaian sembari menyingkapkan kebenaran?

1) Pendidikan Perdamaian

Pendidikan perdamaian adalah pendidikan hati. Orang dibina untuk memiliki hati yang damai dan manusiawi. Kemanusiaan hati terletak pada sikap mendengarkan. Yang

didengarkan bukanlah kepentingan egoistik sendiri. Pendidikan perdamaian adalah juga pendidikan budi. Akal budi manusia menjadi seperti pelita bagi hidup manusia. Jika pelita itu memancarkan cahaya redup, hidup manusia pun akan mengalami situasi redup. Sebaliknya, jika pelita itu memancarkan cahaya cemerlang, hidup pun akan menjadi cemerlang. Perdamaian meminta kecemerlangan hidup sehari-hari. Jika sehari-hari dipenuhi dengan pertikaian dan manipulasi, pelita itu redup^{xii}.

Pendidikan perdamaian merupakan cetusan kemanusiawian. Perkara perdamaian adalah perkara manusia, sehingga pendidikan perdamaian menjadi kesibukan manusia. Perdamaian terjadi manakala hidup berdampingan bersama dengan sesama yang lain. Perdamaian menjadi mungkin jika dimungkinkan hidup bersama. Dengan demikian, pendidikan perdamaian dimulai dari kebersamaan keseharian hidup manusia. Pendidikan perdamaian tidak dapat dicapai dengan promosi dan kekerasan belaka. Pendidikan perdamaian menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Tradisi atau kultur perdamaian dapat menjadi habitus dalam diri individu jika terus-menerus ditanamkan.

“Sadarlah kau, kata hidup...kalaupun ini bisa disebut ‘hidup’...di sebuah dunia yang rusak? Ya, rusak, seperti arloji macet.” Demikian teriakan Gabriel Marcel^{xiii}.

Dunia yang rusak, penuh pertikaian dan konflik tampaknya selalu berada di tengah-tengah kehidupan manusia. Benarkah hidup manusia bagai arloji macet? Armada menegaskan manusia adalah makhluk yang berkeluasan yang terus berjalan. Manusia dalam dirinya masih memiliki harapan dan peluang menata kembali hidup yang telah rusak. Problem merupakan atribut kesehatan manusia. Ia sepenuhnya ada di hadapan manusia. Ia ada untuk diurai secara detail dan dipecahkan dalam semangat kebenaran dan perdamaian.

2) Rasionalitas Komunikatif

Jürgen Habermas mempromosikan rasionalitas komunikatif dalam kerangka mencapai konsensus dalam kemajemukan kepentingan masyarakat demokratis. Habermas merumuskan rasionalitas komunikatif yang bertujuan untuk mencapai kesalingpahaman dan kesepakatan dengan jalan menuntut supaya klaim-klaim dapat saling menguji dan berkoordinasi^{xiv}. Di tengah berbagai diversitas klaim yang saling membenarkan baik dari kubu masyarakat, kelompok tertentu maupun pemerintah, realisasi rasionalitas komunikatif sangat dibutuhkan. Rasionalitas komunikatif dalam konteks masyarakat demokratis menjadi semacam jembatan yang mempertemukan dan menyatukan serta menyingkapkan kebenaran dengan rasa keadilan. Pada dasarnya klaim-klaim kebenaran tidak dapat dipatenkan sepihak saja. Praktik ideologi Orde Baru memberikan pelajaran berharga bahwa klaim-klaim kebenaran yang dipatenkan sepihak (penguasa) tidak membuahkan rasa keadilan^{xv}.

Dinamika politik dan keamanan yang telah menyedjarah akhir-akhir ini, dalam wujud pembunuhan di Sigi, penolakan *Omnibus Law*, dinamika politik di Papua, dan tewasnya anggota FPI, membangkitkan kesadaran-kesadaran baru untuk mengejar kebenaran dan rekonsiliasi. Dinamika yang terjadi sejatinya harus dijawab dengan upaya rekonsiliasi dan penyingkapan kebenaran. Sebagai kontribusinya terhadap kondisi itu, Armada menandatangani gagasannya^{xvi}.

“Inilah yang kita temukan manakala bersama-sama kita diminta untuk melakukan refleksi tentang memoria passionis dan menegaskan tekad untuk menguak kebenaran dan mengulurkan tangan rekonsiliatif satu sama lain. Jika seorang meminati refleksi memoria passionis bangsanya, sesungguhnya ia sedang meminati pendalaman realitas hidup bersamanya. Ia sedang melakukan diskursus pencarian kebenaran-kebenaran dalam hidup bersamanya. Itu bukan kebenaran rangkaian kata, atau apalagi berupa kalimat semata. melainkan kebenaran real yang mengubah, mentransformasi kehidupan.”

Dalam kaitan itu, rasionalitas komunikatif seperti yang dipromosikan Habermas dapat menjadi strategi yang efektif dalam menjabatani upaya rekonsiliasi dan penyingkapan kebenaran. Dinamika politik dan keamanan yang telah merebak sejauh ini tentu berangkat dari berbagai kepentingan, dari ketidaksepakatan dan tidak saling paham. Oleh karena itu, sebagai negara demokratis, Indonesia harus melaksanakan pemeriksaan rasional. Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait harus mengupayakan diskursus penyingkapan kebenaran dalam hidup bersama. Dalam upaya itu, dituntut tindakan rasionalitas komunikatif untuk menguji berbagai atensi atau preferensi dalam terang nilai, keadilan dan transparansi demi tercapai kesalingpahaman dan kesepakatan.

3. Kesimpulan

Politik di Indonesia selalu mengedepankan aspek rujuk rukun. Politik berbasis perdamaian. Dewasa ini tema perdamaian menjadi topik yang tidak habis dibicarakan. Dinamika politik dan keamanan yang sedang berserawut banyak menimbulkan polemik yang berujung pada ketidakharmonisan hubungan baik antar masyarakat maupun masyarakat dengan pihak pemerintah. Masyarakat dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menghadirkan wajah perdamaian di tengah kehidupan. Meskipun demikian, realitasnya tidak berlangsung demikian.

Berkaca pada dinamika politik dan keamanan yang telah menyejarah sekaligus masih berlangsung hingga saat ini, upaya rekonsiliasi dan penyingkapan kebenaran harus digalakkan. Terkait hal itu, tulisan ini menilai bahwa politik berasaskan rekonsiliasi dan kebenaran yang digagas Armada Riyanto menjadi program politik yang relevan dengan politik Indonesia yang berbasis perdamaian. Rekonsiliasi yang dipromosikan Armada memiliki kaitan yang erat dengan kebenaran. Menurut Armada, rekonsiliasi tidak dapat dijalankan tanpa pengungkapan kebenaran. Sebaliknya, suatu kebenaran akan memiliki makna yang mendalam ketika dilanjutkan pada tindakan rekonsiliatif.

Pertanyaan selanjutnya bagaimana program ini diaktualisasikan? Pertama-tama upaya menciptakan dan merawat perdamaian adalah tanggung jawab bersama. Ini bukan sekadar tanggung jawab pemerintah atau masyarakat saja. Oleh karena itu, upaya yang diusulkan adalah menggalakkan pendidikan perdamaian dan upaya hukum yang berbasis rasionalitas komunikatif. Pendidikan perdamaian adalah pendidikan hati. Keutamaan perdamaian akan menetap dalam diri seseorang manakala ditanamkan secara terus menerus yang kemudian menjadi habitus baginya.

Habermas mempromosikan rasionalitas komunikatif sebagai upaya untuk mencapai kesalingpahaman dan kesepakatan. Di tengah berbagai diversitas klaim yang saling membenarkan baik dari kubu masyarakat, kelompok tertentu maupun pemerintah, aktualisasi rasionalitas komunikatif sangat dibutuhkan. Rasionalitas komunikatif dalam konteks masyarakat demokratis menjadi semacam jembatan yang mempertemukan dan

menyatukan serta menyingkapkan kebenaran dengan rasa keadilan. Tugas pemerintah adalah memperkuat penegakkan hukum dan menciptakan peradilan yang bersih supaya rasa keadilan dan *bonum commune* dirasakan di tengah kehidupan bersama. Sinergitas antara pemerintah dan masyarakat menentukan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara.

Daftar Pustaka

- Riyanto, Armada. *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- _____. *Filsafat Etika Politik, Diskursus Konteks Indonesia*. Malang: STFT Widya Sasana, 2007.
- Adian, Donny. *Rasionalitas Kerjasama*. Depok: Koekoesan, 2013.
- M. Clohesy, Antony. *Politic of Emphaty: Ethics, Solidarity, and Recognition*. London: British Library, 2013.
- Syukur Dister, Nico. *Filsafat Kebebasan*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Goenawan Muhamad, "Misteri." *Tempo*, 13 Mei 2018, 114.
- Kompas*, 14 Oktober 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/19004311/kasus-penembakan-6-simpatisan-rizieq-shihab-divisi-propam-polri-turun-tangan?page=all>. Diakses pada Senin, 14 Desember 2020.
- T. Ruseni, Yasintus. "Pengakuan sebagai Gramatika Intersubjektif menurut Axel Honneth." *Melintas*, Vol.30, No.3, Maret 2014: 323-345.

Catatan Akhir

- ⁱ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), 23.
- ⁱⁱ <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/08/19004311/kasus-penembakan-6-simpatisan-rizieq-shihab-divisi-propam-polri-turun-tangan?page=all>, diakses pada Senin, 14 Desember 2020.
- ⁱⁱⁱ Armada Riyanto, *Filsafat Etika Politik, Diskursus Konteks Indonesia*, (Malang: STFT Widya Sasana, 2007), 53.
- ^{iv} Nico Syukur Dister, *Filsafat Kebebasan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 48.
- ^v Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 91.
- ^{vi} Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 97.
- ^{vii} Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 97.
- ^{viii} Antony M. Clohesy, *Politic of Emphaty: Ethics, Solidarity, and Recognition*, (London: British Library, 2013), 103: "Gagasan Honneth perihal pengakuan sangat kuat dalam tulusannya 'The Struggle of Recognition', dan dalam pembahasannya diuraikan bahwa Honneth merefleksikan tiga ruang lingkup pengakuan, yaitu *love, law and solidarity*. Gagasan ini mendukung konsep tentang pengakuan."
- ^{ix} Yasintus T. Ruseni, "Pengakuan sebagai Gramatika Intersubjektif menurut Axel Honneth," *Melintas*, Vol.30, No.3, Maret 2014: 323-345(329).
- ^x Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 99.
- ^{xi} *Kompas*, 14 Oktober 2020.
- ^{xii} Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 111.
- ^{xiii} Goenawan Muhamad, "Misteri," *Tempo*, 13 Mei 2018, 114.
- ^{xiv} Donny Adian, *Rasionalitas Kerjasama*, (Depok: Koekoesan, 2013), 151.
- ^{xv} Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 97.
- ^{xvi} Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 111.